

BAB I

PENDAHULUAN

I.I LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat dituntut untuk melakukan transparansi dana kuntabilitas terhadap pengelolaan keuangannya agar tercipta pemerintah yang bersih. Salah satu upaya konkrit pemerintah daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangannya adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Standar akuntansi pemerintah ini diatur dalam peraturan pemerintah RI nomor 24 tahun 2005. dalam kerangka konseptual standar akuntansi pemerintah menyebutkan salah satu prinsip akuntansi adalah pengungkapan lengkap (*full disclosure*), dimana laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi-informasi yang berguna bagi pengguna laporan baik pada lembar muka laporan keuangan ataupun pada catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Dengan adanya standar akuntansi pemerintah, undang-undang dan peraturan pemerintah yang mendukung maka Pemerintah Daerah telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Tetapi, apakah laporan keuangan tersebut telah mengungkapkan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah. Beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk mengukur tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah (LKPD) terhadap standar akuntansi pemerintahan masih terbilang rendah. Dengan menggunakan data tahun 2006, Liestiani (2008) mengungkapkan bahwa pengungkapan LKPD sebesar 35,45% dan Mandasari (2009) dalam Lesmana (2010) mengungkapkan bahwa rata-rata pengungkapan Pemerintah Daerah sebesar 52,57%. Dengan menggunakan data LKPD tahun 2007, Lesmana (2010) mengungkapkan bahwa rata-rata pengungkapan LKPD hanya sebesar 22% dengan menggunakan butir pengungkapan yang lebih banyak dibandingkan penelitian Mandasari (2009). Suhardjanto, et.al (2010) menunjukkan tingkat rata-rata pengungkapan yang lebih tinggi yaitu sebesar 51,56%. Hilmi (2011) juga mengungkapkan bahwa rata-rata pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama tahun 2006 hingga tahun 2009 sebesar 44,56%.

Hasil pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang masih terbilang rendah membuat peneliti ingin menganalisis lebih lanjut tentang analisis yang mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD. Patrick (2007) menemukan bahwa ukuran (*size*) organisasi dan budaya organisasi yang diproksikan dengan kecenderungan untuk melakukan inovasi dan tanggapan terhadap konstituen, mempunyai hubungan yang paling kuat dengan inovasi administratif yang diproksikan dengan determinasi dalam pembiayaan utang berhubungan secara positif meskipun pada tingkat moderat dan lemah. Sedangkan pengaruh *intergovernmental revenue*.

Liestiani (2008) menemukan bahwa kekayaan, kompleksitas pemerintahan dan jumlah temuan audit mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD sedangkan

pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan klasifikasi Pemerintah Daerah tidak mempengaruhi tingkat pengungkapan LKPD. Lesmana (2010) meneliti pengaruh dua karakteristik Pemerintah Daerah, yaitu ukuran Pemerintah Daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hasilnya menemukan bahwa ukuran Pemerintah Daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Hasil yang berbeda juga pada penelitian suhardjanto, (2010) dengan menggunakan modifikasi model Patrick (2007) menemukan bahwa hanya dana perimbangan dan latar belakang bupati yang merupakan prediktor yang signifikan terhadap kepatuhan pengungkapan SAP yang wajib. Pengungkapan LKPD yang masih terbilang rendah ini juga berpengaruh pada opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yaitu masih banyaknya Laporan Keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang mendapat opini tidak wajar dan tidak menyatakan pendapat. Menurut iktisar hasil pemeriksaan tahun 2010 yang dilakukan oleh BPK, opini wajar tanpa pengecualian yang diperoleh pemerintah daerah di Indonesia selama tahun 2019-2021 hanya sebanyak 63 LKPD dari 981 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diperiksa selama kurun waktu tersebut. Sedangkan sisanya mendapatkan opini selain WTP, yaitu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sebanyak 654 entitas, opini Tidak Wajar (TW) sebanyak 79 entitas dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) sebanyak 221 entitas. Itu berarti hanya sekitar 2,55% dari keseluruhan Pemerintah Daerah yang telah menyajikan laporan keuangannya secara wajar. menunjukkan perkembangan opini

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama tahun 2019 sampai dengan 2021. Dapat diketahui bahwa opini LKPD Tahun 2019 dan 2021 menunjukkan adanya peningkatan jumlah pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP dan WDP yang diikuti dengan penurunan proporsi opini TMP. Hal ini menggambarkan bahwa adanya perbaikan yang dicapai oleh entitas Pemerintah Daerah dalam menyajikan suatu laporan keuangan yang wajar. Mempertimbangkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis lebih lanjut pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Masih serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Liestiani (2008), yaitu penelitian ini masih menggunakan pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan fokus pada tingkat pengungkapan LKPD dengan metode *scoring* pada Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Terdapat beberapa perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian ini menggunakan butir *checklist* pengungkapan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang lebih lengkap sebanyak 264 butir pengungkapan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, seperti Lesmana (2010) yang hanya menggunakan 46 butir pengungkapan. Butir *checklist* dalam penelitian ini mencakup semua item yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan yang dibagi dalam lima bagian (detail *checklist* dapat dilihat pada Lampiran 1), yaitu: (i) penyajian informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian

target peraturan daerah APBD;(ii) ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan; (iii) dasar penyajian laporan keuangan, pengungkapan kebijakan akuntansi keuangan dan penjelasan setiap pos pada laporan keuangan (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas); (iv) pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan SAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan dan (v) pengungkapan-pengungkapan lainnya. Sedangkan dalam penelitian Lesmana (2010), elemen pengungkapan hanya yang tertuang dalam pengungkapan penelitian Lesmana (2010).

2. Penelitian ini menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk tahun anggaran 2019 - 2021.
3. Total observasi dalam penelitian ini adalah 620 laporan keuangan Pemerintah Daerah, dimana sampel ini lebih banyak dari sampel penelitian Liestiani (2008) dan Lesmana (2010) yang masing-masing berjumlah 100 LKPD dan 79 LKPD.
4. Penelitian ini menguji beberapa variabel independen pada penelitian Patrick (2007), yaitu ukuran Pemerintah Daerah, Selain itu, ditambahkan pula variabel independen lainnya yang diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah, yaitu kekayaan Pemerintah Daerah, dan rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, penelitian ini fokus kepada karakteristik pemerintah Daerah di Indonesia yang termasuk dalam kelompok struktur organisasi dan lingkungan eksternal dari pemerintah daerah untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Struktur organisasi terdiri dari ukuran Pemerintah Daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, peneliti ingin menguji Analisis pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan pada badan pemeriksa keuangan republik Indonesia perwakilan provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.3 Persoalan Penelitian

1. Apakah ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah rasio kemandirian keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

1.4 Tujuan dan manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan penelitian

1. Untuk menemukan bukti terhadap ukuran pemerintah daerah pada tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah pada BPK RI provinsi NTT tahun 2019-2021
2. Untuk menemukan bukti pada rasio kemandirian keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di BPK RI provinsi NTT tahun 2019-2021

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini sebagai bahan referensi bagi fakultas ekonomi khususnya jurusan minat akuntansi sektor publik dalam rangka menambah wawasan berpikir khususnya bagi mahasiswa dan juga sebagai bahan informasi bagi pembaca atau peneliti yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menambah wawasan dan memahami analisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.